



# Laporan Kinerja

TAHUN 2022



**DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN SIDOARJO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Tuhan Yang Maha Esa. atas berkat dan rahmat-Nya, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo mampu menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo tahun 2022.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 menetapkan 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja. Secara umum Dinas PUBMSDA cukup berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan semuanya sudah tercapai diatas 100%. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat segera terselesaikan. Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air kabupaten Sidoarjo tahun 2022. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan dan peningkatan kinerja untuk tahun berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo ini.

Sidoarjo, 28 Februari 2023

**KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER  
DAYA AIR  
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

DWI EKO SAPTONO, S. Sos, MM. MT  
NIP. 197002211990031002

**DWI EKO SAPTONO, S.Sos., MM , MT**  
Pembina Tk. I  
NIP. 197002211990031002

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR GRAFIK .....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Kedudukan .....	1
1.2 Aspek Strategis Organisasi .....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	20
2.1 Visi dan Misi .....	20
2.2 Tujuan dan Sasaran .....	20
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	21
2.4 Perencanaan Anggaran Tahun 2022 .....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	24
3.1 Pengukuran Kinerja .....	24
3.2 Analisis Capaian Kinerja .....	25
3.3 Realisasi Anggaran .....	31
BAB IV PENUTUP .....	32
4.1 Kesimpulan .....	32
4.2 Pemecahan Masalah .....	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	33

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 PNS berdasarkan Jabatan .....	11
Tabel 1.2 Jumlah Tenaga Non ASN .....	12
Tabel 1.3 Jumlah SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Usia .....	12
Tabel 1.4 Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	13
Tabel 1.5 Rumusan Kreteria Penentuan dan Nilai Bobot Isue Strategis .....	15
Tabel 1.6 Penetapan Isu-isu Strategis .....	15
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	22
Tabel 2.2 Rincian Anggaran pada Tahun 2022 .....	23
Tabel 3.1 Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja .....	24
Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Sasaran pertama.....	25
Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Sasaran kedua .....	27
Tabel 3.4 Perkembangan Kinerja Sasaran Tahun 2021-2022 .....	29
Tabel 3.5 Perkembangan Kinerja Sasaran terhadap Target Akhir Renstra.....	30
Tabel 3.6 Realisasi Kinerja Program.....	31
Tabel 3.7 Realisasi Kinerja dan Keuangan .....	31

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	3

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 Realisasi Kinerja Sasaran pertama.....	25
Grafik 3.2 Realisasi Kinerja Sasaran kedua.....	27
Grafik 3.3 Perkembangan Kinerja Sasaran Tahun 2021-2022.....	29
Grafik 3.4 Perkembangan Kinerja Sasaran terhadap Target Akhir Renstra .....	30

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka capaian kinerja tahun 2022 telah mencapai target semuanya. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021, disampaikan sebagai berikut :

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	% Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	100,05%	Sangat Berhasil
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi	105,66%	Sangat Berhasil
		Persentase luasan genangan/ banjir tertangani	101,85%	Sangat Berhasil

### Keterangan :

No.	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

Sehingga dari kedua tujuan dan ketiga Sasaran pada Tahun 2022 rata – rata realisasi kinerja mencapai 102,52% atau kategori Sangat Berhasil. Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 1 Tujuan dengan 1 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	Sangat Berhasil

- Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 2 sasaran dengan 3 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Sangat Berhasil
2.	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi	Sangat Berhasil
3.	Persentase luasan genangan/ banjir tertangani	Sangat berhasil

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 *Kedudukan*



Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya sub urusan jalan, sumber daya air, dan drainase, serta tugas pembantuan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.

Sesuai dengan peraturan Bupati tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

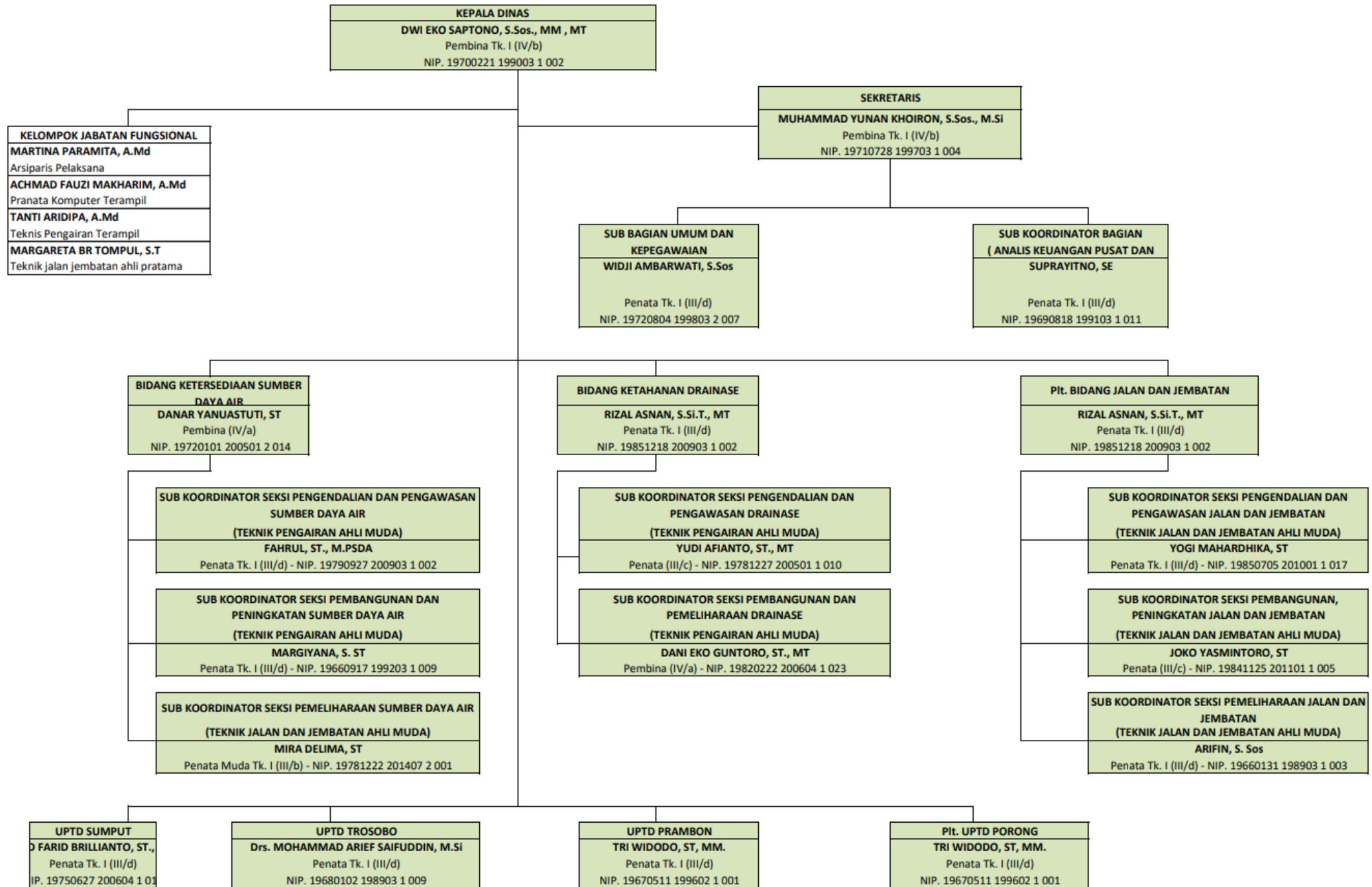
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan jalan, sub urusan sumber daya air dan sub urusan drainase serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2022 tersebut di atas, susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, ditetapkan sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas
2. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri atas:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
3. Unsur Pelaksana, terdiri atas:
  - 1) Bidang Jalan dan Jembatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
  - 2) Bidang Ketersediaan Sumber Daya Air, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
  - 3) Bidang Ketahanan Drainase, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
  - 4) Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi



**a. Tugas Pokok dan Fungsi**

Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program yang menjadi kewenangan dinas serta kesekretariatan;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
  - c. pembinaan pelaksanaan program dan kinerja dinas
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
  - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.
2. **Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang sekretariat yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja dinas.  
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyusunan program kerja dan laporan kinerja;
  - b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
  - c. pelaksanaan fungsi pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi :
    - 1) melaksanakan administrasi keuangan;
    - 2) melaksanakan pengendalian serapan anggaran;
    - 3) melaksanakan analisa dan evaluasi anggaran;
    - 4) menyusun laporan pengelolaan keuangan;
  - d. pengoordinasian program/kegiatan area Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Zona Integritas, dan akuntabilitas pada dinas;
  - e. pelaksanaan fungsi perencanaan dan pelaporan, yang meliputi :
    - 1) menyusun program kerja dinas;
    - 2) mengoordinir seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan dinas;
    - 3) menyusun rencana kebutuhan anggaran;
    - 4) melaksanakan pengendalian, evaluasi dan capaian program/kegiatan/sub kegiatan pada dinas;
    - 5) mengoordinir dan mengelola dapodik dinas;
    - 6) menyusun laporan kinerja dinas;
    - 7) melaksanakan analisa dan evaluasi data perencanaan;
  - f. pelaporan kinerja dinas;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang, termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Dinas;
- c. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku;
- d. menerima dan mengkoordinasikan publikasi, pelayanan (front office) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi /website dinas;
- f. melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN;
- h. melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3. **Bidang Jalan dan Jembatan**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis jalan dan jembatan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, yang meliputi :
  - 1) menyusun perumusan kebijakan teknis pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
  - 2) menyusun perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan;
  - 3) melaksanakan pembebasan lahan/tanah untuk pembangunan jalan dan jembatan;
  - 4) melaksanakan pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
  - 5) menyusun dan memperbaharui data teknis pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;

- 6) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, yang meliputi:
- 1) menyusun perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - 2) menyusun rencana teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - 3) melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kategori berat;
  - 4) mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kategori ringan;
  - 5) melaksanakan tanggap darurat jalan dan jembatan akibat bencana;
  - 6) mengelola pengaduan dan solusi percepatan pelayanan penanganan teknis jalan dan jembatan;
  - 7) melaksanakan pemeliharaan respon cepat sesuai dengan kewenangan dinas;
  - 8) melaksanakan pengelolaan peralatan pada bidang jalan dan jembatan;
  - 9) menyusun dan memperbaharui data teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian jalan dan jembatan, yang meliputi :
- 1) menyusun perumusan kebijakan teknis data, pengendalian dan pengawasan jalan dan jembatan;
  - 2) mengkoordinir pemutakhiran data jalan dan jembatan untuk kebutuhan data bidang;
  - 3) menyusun rencana umum, kebijakan strategi pengembangan jaringan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan dinas;
  - 4) melaksanakan pengendalian, pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan;
  - 5) mengoordinasikan tindaklanjut dari penyalahgunaan fungsi jalan dan jembatan;
  - 6) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan dan jembatan;
  - 7) melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada Bidang;
  - 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis data, pengawasan jalan dan jembatan;

- 9) monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan jalan dan jembatan;
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

**4. Bidang Ketersediaan Sumber Daya Air**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang penyediaan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyediaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis Ketersediaan Sumber Daya Air;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Ketersediaan Sumber Daya Air;
- c. pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan Sumber Daya Air, yang meliputi :
  - 1) menyusun perumusan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan sumber daya air;
  - 2) menyusun perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan sumber daya air
  - 3) melaksanakan pembebasan lahan/tanah untuk pembangunan dan peningkatan sumber daya air;
  - 4) melaksanakan pembangunan dan peningkatan sarana sumber daya air;
  - 5) melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder;
  - 6) menyusun dan memperbaharui data teknis pembangunan, peningkatan pembangunan dan peningkatan sumber daya air;
  - 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan dan peningkatan sumber daya air;
- d. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Sumber Daya Air, yang meliputi :
  - 1) menyusun perumusan kebijakan teknis pemeliharaan sumber daya air;
  - 2) menyusun rencana teknis pemeliharaan sumber daya air;
  - 3) melaksanakan pemeliharaan sumber daya air dengan kategori berat;
  - 4) mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan sumber daya air dengan kategori ringan yang dilaksanakan oleh UPTD;
  - 5) melaksanakan tanggap darurat sumber daya air akibat bencana;
  - 6) mengelola pengaduan dan solusi percepatan pelayanan penanganan teknis sumber daya air;
  - 7) melaksanakan pemeliharaan respon cepat sesuai dengan kewenangan dinas;

- 8) menyusun dan memperbaharui data teknis pemeliharaan sumber daya air;
  - 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan sumber daya air;
  - e. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Air, yang meliputi :
    - 1) menyusun perumusan kebijakan teknis data, pengendalian dan pengawasan sumber daya air;
    - 2) mengoordinir pemutakhiran data sumber daya air untuk kebutuhan data bidang;
    - 3) menyusun rencana umum, kebijakan strategi pengembangan jaringan sumber daya air guna ketercukupan air wilayah pertanian yang menjadi kewenangan dinas;
    - 4) melaksanakan pengendalian, pengawasan pemanfaatan jaringan sumber daya air yang menjadi kewenangannya;
    - 5) mengoordinasikan tindaklanjut dari penyalahgunaan fungsi pada jaringan sumber daya air;
    - 6) melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengoordinir kebutuhan data pada bidang;
    - 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan data, pengendalian dan pengawasan sumber daya air;
  - f. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Ketersediaan Sumber Daya Air;
  - g. pelaporan kinerja bidang Ketersediaan Sumber Daya Air;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya
- 5. Bidang Ketahanan Drainase**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas dalam bidang ketahanan drainase. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketahanan Drainase mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan ketahanan drainase;
  - b. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan ketahanan drainase;
  - c. pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan drainase, yang meliputi :
    - 1) menyusun perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pemeliharaan drainase;
    - 2) menyusun perencanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan drainase;

- 3) melaksanakan pembebasan lahan/tanah untuk pembangunan dan pemeliharaan drainase;
  - 4) melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sistem drainase;
  - 5) mengelola pengaduan dan solusi percepatan pelayanan penanganan teknis drainase;
  - 6) menyusun dan memperbaharui data teknis pembangunan dan pemeliharaan drainase;
  - 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan drainase;
- d. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan drainase, yang meliputi:
- 1) menyusun perumusan kebijakan teknis data pengendalian dan pengawasan drainase;
  - 2) mengoordinir pemutakhiran data, pengawasan drainase untuk kebutuhan data bidang;
  - 3) menyusun rencana umum, kebijakan strategi pengembangan jaringan data, pengawasan drainase yang menjadi kewenangan dinas;
  - 4) melaksanakan tanggap darurat drainase akibat bencana;
  - 5) melaksanakan respon cepat terhadap banjir sesuai dengan kewenangan dinas;
  - 6) melaksanakan normalisasi drainase yang menjadi kewenangan dinas, serta pengangkutan limbah/material dari normalisasi sampai ke TPA;
  - 7) melaksanakan pengawasan pemanfaatan jaringan drainase yang menjadi kewenangan dinas;
  - 8) mengoordinasikan tindaklanjut dari penyalahgunaan fungsi pada jaringan drainase;
  - 9) melaksanakan pengelolaan peralatan untuk drainase dan sumber daya air
  - 10) melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengoordinir kebutuhan data pada bidang;
  - 11) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan data, pengendalian dan pengawasan drainase;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ketahanan drainase;
- f. pelaporan kinerja bidang ketahanan drainase;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya

**6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**, adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis operasional dan/ atau penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

**7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang Koordinator dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang atau Sekretaris sesuai tugas fungsinya

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan berlandaskan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2022 tersebut di atas secara kapasitas dan ukuran telah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan. Serta telah sesuai dengan ketentuan tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya.

Aparatur Sipil Negara baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Dengan Perikatan Kerja (PPPK) atau Non-PNS, merupakan unsur abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai peran cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan. Oleh sebab itu Aparatur Sipil Negara dituntut untuk mampu memanfaatkan sumber daya berupa dana maupun sarana dan prasarana yang telah disediakan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebanyak 349 personil, terdiri atas 135 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sebanyak 214 orang Pegawai Non – PNS. Berdasarkan jabatannya, komposisi PNS Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, terinci sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**PNS Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Berdasarkan Jabatan**

NO	NAMA JABATAN	GOL	JUMLAH
1	Kepala Dinas	Eselon IIB / Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1
2	Sekretaris Dinas	Eselon IIIA / Jabatan Administrator	1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Eselon IVA / Jabatan Pengawas	1
4	Pengelola Kepegawaian	Jabatan Pelaksana	1
5	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Jabatan Pelaksana	1
6	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Jabatan Pelaksana	1
7	Arsiparis		1
8	Pranata Komputer		1
9	Pengemudi	Jabatan Pelaksana	1
10	Petugas Keamanan	Jabatan Pelaksana	2
11	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah		0
12	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Jabatan Pelaksana	0
13	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	Jabatan Pelaksana	0
14	Bendahara	Jabatan Pelaksana	1
15	Pengelola Keuangan	Jabatan Pelaksana	2
16	Pengelola Gaji	Jabatan Pelaksana	1
17	Pengelola Bahan Perencanaan	Jabatan Pelaksana	1
18	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan	Eselon IIIB / Jabatan Administrator	1
19	Penata Kelola Jalan dan Jembatan		0
20	Penata Kelola Jalan dan Jembatan		0
21	Pemeriksa Jalan dan Jembatan	Jabatan Pelaksana	1
22	Operator Alat Berat	Jabatan Pelaksana	3
23	Analisis Jalan Jembatan	Jabatan Pelaksana	0
24	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	Jabatan Pelaksana	1
25	Pengelola Teknis Survei Jaringan Prasarana dan Pelayanan	Jabatan Pelaksana	0
26	Pengelola Data	Jabatan Pelaksana	6
27	Teknik Jalan dan Jembatan		3
28	Teknik Jalan dan Jembatan		2
29	Kepala Bidang Ketersediaan Sumber Daya Air	Eselon IIIB / Jabatan Administrator	1
30	Teknik Pengairan		0
31	Teknik Pengairan		2
32	Teknik Jalan dan Jembatan		1
33	Teknik Pengairan		0
34	Analisis Jalan Jembatan	Jabatan Pelaksana	1
35	Analisis Sumber Daya Air	Jabatan Pelaksana	0
36	Pengelola Sumber Daya Air	Jabatan Pelaksana	0
37	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Jabatan Pelaksana	1
38	Operator Alat Berat	Jabatan Pelaksana	2
39	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	Jabatan Pelaksana	0
40	Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan	Jabatan Pelaksana	0
41	Pengadministrasi Umum	Jabatan Pelaksana	3
42	Pengelola Pengairan	Jabatan Pelaksana	1
43	Kepala Bidang Ketahanan Drainase	Eselon IIIB / Jabatan Administrator	1
44	Teknik Pengairan		2
45	Teknik Pengairan		1
46	Pengelola Pengairan	Jabatan Pelaksana	1
47	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	Jabatan Pelaksana	1
48	Pengadministrasi Umum	Jabatan Pelaksana	3
49	Kepala UPTD A Air dan Jalan Wilayah Trosobo	Eselon IVA / Jabatan Pengawas	1

50	Pengadministrasi Umum	Jabatan Pelaksana	1
51	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Jabatan Pelaksana	1
52	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Jabatan Pelaksana	7
53	Penjaga Pintu Air	Jabatan Pelaksana	2
54	Kepala UPTD A Air dan Jalan Wilayah Sumpud	Eselon IVA / Jabatan Pengawas	0
55	Pengadministrasi Umum	Jabatan Pelaksana	1
56	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Jabatan Pelaksana	1
57	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Jabatan Pelaksana	8
58	Penjaga Pintu Air	Jabatan Pelaksana	7
59	Kepala UPTD A Air dan Jalan Wilayah Prambon	Eselon IVA / Jabatan Pengawas	1
60	Pengadministrasi Umum	Eselon IIB / Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	2
61	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Jabatan Pelaksana	0
62	Petugas Keamanan	Jabatan Pelaksana	1
63	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Jabatan Pelaksana	2
64	Penjaga Pintu Air	Jabatan Pelaksana	4
65	Kepala UPTD A Air dan Jalan Wilayah Porong	Eselon IVA / Jabatan Pengawas	0
66	Pengadministrasi Umum	Jabatan Pelaksana	0
67	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Jabatan Pelaksana	0
68	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Jabatan Pelaksana	4
69	Penjaga Pintu Air	Jabatan Pelaksana	3
<b>Jumlah</b>			<b>104</b>

Adapun jumlah dan penugasan Pegawai/tenaga Non - PNS Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air terinci sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Tenaga Non – PNS**  
**Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air**

No.	Jabatan Non – PNS	Jumlah
1	Tenaga Front Office	3 Orang
2	Tenaga Kerja Keamanan	9 Orang
3	Tenaga Perbengkelan	6 Orang
4	Tenaga Kerja Teknologi Informasi	2 Orang
5	Tenaga Juru Gambar	15 Orang
6	Tenaga Sopir Alat Berat	10 Orang
7	Tenaga Kebersihan	10 Orang
8	Tenaga Penjaga DAM	20 Orang
9	Tenaga Pembersih Saluran / Afvoer	116 Orang
10	Tenaga Penjaga Busem	2 Orang
11	Tenaga Penjaga Busem & Operator Pompa	21 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>214 Orang</b>

Berdasarkan tingkat usia, SDM Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

**Tabel; 1.3**  
**Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Usia**

Usia SDM	Tingkat Pendidikan						Jumlah
	S2/S3	S1	D3/D2/D1	SLTA	SLTP	SD	
s.d 54 Tahun	5	28	7	114	128	0	282
> 54 Tahun	3	0	1	9	36	18	67
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>123</b>	<b>164</b>	<b>18</b>	<b>349</b>

Berdasarkan tingkat pendidikan, Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo terinci sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan Formal	PNS	Non – PNS	Jumlah
1	STRATA 2 (S-2)	8 Orang	-	8 Orang
2	STRATA 1 (S-1)	25 Orang	3 Orang	28 Orang
3	AHLI MADYA (D-3)	8 Orang	-	8 Orang
4	SMA / STM	28 Orang	95 Orang	123 Orang
5	SMP	48 Orang	116 Orang	164 Orang
6	SD	18 Orang	-	18 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>135 Orang</b>	<b>214 Orang</b>	<b>349 Orang</b>

Jumlah pegawai yang cukup dengan kompetensi yang memadai diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan data pegawai tersebut di atas, nampak bahwa kapasitas sumber daya manusia yang ada cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, mengingat sebagian besar masih dalam kategori usia produktif (sampai dengan 54 tahun) yaitu sebanyak 282 orang atau 80,8 % dan secara kualitas selain memiliki tingkat pendidikan yang memadai yakni S1 dan S2, bidang studi (jurusan pendidikan) yang ditempuh juga linier dengan pelaksanaan tupoksi. Namun demikian untuk menunjang kinerja yang lebih optimal, kepada aparatur atau personil yang latar belakang pendidikannya bukan bidang pekerjaan umum (bina marga dan/atau sumber daya air), masih perlu diberikan pelatihan teknis yang sesuai bidang tugasnya. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo menetapkan bahwa jabatan struktural hanya terbatas pada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, namun demikian belum seluruh pegawai ditetapkan jabatan fungsionalnya.

## 1.2 *Aspek Strategis Organisasi*

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan

dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air\_Kabupaten Sidoarjo.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi, Misi Bupati Sidoarjo, Renstra Kementerian, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan Renetra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah Sidoarjo, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, diperoleh isu - isu strategis yang akan ditangani melalui program dan kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

- (1) Dibahas melalui forum *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
- (2) Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan.
- (3) Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten  
Sidoarjo

Dalam menetapkan prioritas atau *ranking issue* strategis tersebut, dilakukan identifikasi keterkaitannya dengan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan penilaian sesuai pembobotan sebagai berikut:

**Tabel: 1.5**  
**Rumusan Kreteria Penentuan dan Nilai Bobot Isue Strategis.**

No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isue strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Merupakan janji politik yang perlu diwujudkan	15
	Jumlah	100

Selanjutnya dari nilai total setiap isue strategis menentukan skala prioritas yang perlu mendapatkan prioritas penanganannya dalam rangka mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan ketentuan pemutakhirannya.. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.3 sebagaimana berikut:

**Tabel 1.6**  
**Penetapan Isu – isu Strategis**

No	Peta Isue Strategis	Kriteria Penilaian ke						Ranking
		1	2	3	4	5	Jml	
	Bobot	25	25	20	15	15	100	
1	Pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi yang cukup pesat serta masih adanya kesenjangan antar wilayah membutuhkan dukungan infrastruktur jaringan jalan yang memadai pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sector	1	1	1	1	1	100	1
2	Banyaknya jaringan jalan dengan kondisi rusak akibat drainase yang kurang menunjang ataupun kurang terkendalinya angkutan berat dengan tonase yang tidak sesuai dengan Muatan Sumbu Terberat yang	1	1	1	1	0	85	4

No	Peta Isue Strategis	Kriteria Penilaian ke						Ranking
		1	2	3	4	5	Jml	
	Bobot		25	25	20	15	15	
	dijijinkan, berdampak kondisi <i>existing</i> jalan tidak sesuai dengan umur rencana.							
3	Pertumbuhan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat bahkan kendaraan berat/besar terus meningkat sedangkan akses jalan relatif masih tetap (tidak sebanding dengan peningkatan kualitas dan kuantitas jalan); sehingga perlu adanya upaya optimal untuk menambah panjang jalan dan lebar jalan.	1	1	1	1	1	100	2
4	Menurunnya lahan pertanian produktif yang berubah menjadi kawasan perumahan, industri dan perdagangan., perlu dilakukan pemetaan dan penanganan pada jaringan Irigasi yang arahnya pada penanggulangan banjir; dan perubahan fungsi saluran dari saluran pembawa menjadi saluran pembuang	1	1	1	0	0	70	6
5	Kondisi fisik bangunan dan jaringan irigasi memerlukan rehabilitasi, dan kondisi lingkungan di sekitar jaringan irigasi ditemui bangunan liar, tanaman keras (misal sengon) maupun tanaman yang berpotensi merusak pasangan tebing (misal rumput gajah)	1	1	0	1	0	65	8
6	Sebagian besar fungsi sungai di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai saluran irigasi yang sekaligus sebagai saluran pematusan sehingga pada beberapa kawasan di 15 wilayah kecamatan memiliki potensi bencana banjir	1	1	0	1	1	80	5
7	Kondisi daya tampung sungai berkurang secara vertikal (terjadi sedimentasi) dan penambahan tampungan secara horisontal (pelebaran dan pemanfaatan sempadan) sulit dilakukan.	1	1	1	0	0	70	7
8	Tingginya sedimentasi, timbulan sampah, pelanggaran sempadan saluran, dan kerusakan tanggul, mempengaruhi kinerja afvoer/ saluran pembuang sehingga memerlukan tindakan monitoring dan evaluasi yang lebih intensif, serta pemeliharaan secara rutin/ berkala	1	1	1	1	1	100	3
9	Mewujudkan pemerintahan yang baik, memerlukan penyederhanaan birokrasi, penguatan komitmen dan pengembangan kualitas ASN, serta pemantapan sistim informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas untuk mendukung inovasi pelayanan public	1	0	0	1	0	40	9

Berdasarkan perhitungan bobot sebagaimana tabel di atas, maka urutan prioritas dari isu- isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi yang cukup pesat serta masih adanya kesenjangan antar wilayah membutuhkan dukungan infrastruktur jaringan jalan yang memadai pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sector
2. Pertumbuhan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat bahkan kendaraan berat/besar terus meningkat sedangkan akses jalan relatif masih tetap (tidak sebanding dengan peningkatan kualitas dan kuantitas jalan); sehingga perlu adanya upaya optimal untuk menambah panjang jalan dan lebar jalan
3. Tingginya sedimentasi, timbulan sampah, pelanggaran sempadan saluran, dan kerusakan tanggul, mempengaruhi kinerja afvoer/ saluran pembuang sehingga memerlukan tindakan monitoring dan evaluasi yang lebih intensif, serta pemeliharaan secara rutin/ berkala
4. Banyaknya jaringan jalan dengan kondisi rusak akibat drainase yang kurang menunjang ataupun kurang terkendalinya angkutan berat dengan tonase yang tidak sesuai dengan Muatan Sumbu Terberat yang diijinkan, berdampak kondisi *existing* jalan tidak sesuai dengan umur rencana.
5. Sebagian besar fungsi sungai di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai saluran irigasi yang sekaligus sebagai saluran pematuan sehingga pada beberapa kawasan di 15 wilayah kecamatan memiliki potensi bencana khususnya bencana banjir
6. Menurunnya lahan pertanian produktif yang berubah menjadi kawasan perumahan, industri dan perdagangan., perlu dilakukan pemetaan dan penanganan pada jaringan Irigasi yang arahnya pada penanggulangan banjir; dan perubahan fungsi saluran dari saluran pembawa menjadi saluran pembuang
7. Kondisi daya tampung sungai berkurang secara vertikal (terjadi sedimentasi) sementara penambahan tampungan secara horisontal (pelebaran dan pemanfaatan sempadan) sulit dilakukan.
8. Kondisi fisik bangunan dan jaringan irigasi memerlukan rehabilitasi, dan kondisi lingkungan di sekitar jaringan irigasi ditemui bangunan liar, tanaman keras (misal sengon) maupun tanaman yang berpotensi merusak pasangan tebing (misal rumput gajah).
9. Mewujudkan pemerintahan yang baik, memerlukan penyederhanaan birokrasi, penguatan komitmen dan pengembangan kualitas ASN, serta pemantapan sistim informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas untuk mendukung inovasi pelayanan publik

Terkait dengan hal tersebut ke depan diharapkan pembangunan infrastruktur jaringan jalan selain harus terintegrasi dengan pembangunan drainase, juga dalam peningkatan kualitas jalan, perlu dipertimbangkan beberapa alternatif jenis konstruksi lapis permukaan yang sesuai dengan kondisi kelas jalan dan struktur tanah jalan, antara lain dengan menggunakan **ASBUTON** ataupun jenis perkerasan lain (konstruksi Beton Cor) sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumbaer Daya Air diharapkan mampu menganalisa dan menyelesaikan beberapa isu strategis di atas, sehingga diharapkan dapat mendorong dan mengawal berbagai agenda pembangunan daerah dalam rangka mengatasi berbagai isu-isu strategis yang ada sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan perubahan-perubahan-perubahan sebagai berikut:

#### **Perubahan Internal**

- 1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM dengan mengadakan atau mengikutsertakan aparatur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumbaer Daya Air pada berbagai kegiatan antara lain bimbingan teknis, diklat, sosialisasi, workshop maupun berbagai macam kegiatan peningkatan kompetensi dan teknis lainnya;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumbaer Daya Air dengan mengedepankan pada pemahaman tugas pokok dan fungsi tiap-tiap unsurnya, meningkatkan disiplin dan etos kerja melalui kegiatan pembinaan internal serta menitikberatkan pada penyusunan dan penerapan Standart Operational Procedure (SOP) dalam pelaksanaan tugas pelayanannya;
- 3) Mendorong penggunaan anggaran tiap tahunnya untuk lebih efisien dan efektif dengan menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan prioritas, inovasi pengembangan kegiatan serta pembentukan citra positif di masyarakat;
- 4) Mengoptimalkan sarana dan prasaran yang ada dan secara bertahap melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan sarana prasarana prioritas untuk mendukung kegiatan operasional.

#### **Perubahan Eksternal**

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami ketentuan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemanfaatan jalan dan salurann irigasi melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

- 2) Melakukan koordinasi secara intensif untuk mensinergikan program dan kegiatan/sub kegiatan dengan OPD terkait guna mencari solusi terbaik dalam menangani permasalahan daerah;

Membentuk satuan tugas reaksi cepat untuk merespon dan menyelesaikan pengaduan dan keluhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan citra positif . Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumbaer Daya Air.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 *Visi dan Misi*

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki visi Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo adalah menunjang misi 3 yaitu “Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.”

### 2.2 *Tujuan dan Sasaran*

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang/subbidang bina marga dan sumber daya air, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo mendukung pencapaian Misi ke 3 yaitu : **“Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan”**, dengan Tujuan, **“Meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan”**. Sedangkan **Sasaran** yang ingin dicapai adalah **“Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata”** dengan indikator capaian berupa **“Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum”**.

Tujuan Perangkat Daerah (PD) merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap PD dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap PD. Tujuan PD harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap PD.

Atas dasar **Tujuan** dan **Sasaran** RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo menetapkan **Tujuan** dalam Renstra Tahun 2021 - 2026 adalah :

**“Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Kebinamargaan dan Sumber Daya Air Secara Memadai”, dengan Indikator “Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air”**

Rumusan **Tujuan** Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo tersebut di atas mempunyai makna atau arti sebagai berikut :

- a. Memiliki orientasi ke masa depan dan mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2021 – 2026.
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada bidang perencanaan pembangunan
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi
- d. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dan juga *stakeholders*.

Sasaran merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang khususnya subbidang bina marga dan subbidang sumber daya air, meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta penyelenggaraan administrasi berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal, agar berhasil guna dan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian tujuan, **“Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Kebinamargaan dan Sumber Daya Air Secara Memadai”,** Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, menetapkan **Sasaran** yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air.
2. Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap.

### **2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya dengan penguatan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Berikut Perjanjian kinerja tahun 2022 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja:

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya betonisasi jalan	Panjang ruas jalan yang dibetonisasi	21.203 m
2.	Terselesaikannya pembangunan frontage road	Panjang ruas jalan frontage road yang dibangun	2.600 m
3.	Meningkatnya revitalisasi sungai	Panjang saluran yang di Normalisasi /pemeliharaan Panjang saluran yang di bangun/ ditingkatkan / direhab	90.826 m 20.686 m
4.	Terselesaikannya pembebasan lahan untuk pembangunan fly over	Jumlah proyek pembangunan fly over yang terfasilitasi pembebasan lahannya	3 Fly Over
5.	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	95%
6.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi	87%
		Persentase luasan genangan/ banjir tertangani	80,51%
7.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	A
		Indeks Reformasi Birokrasi	33,12 (91,24%)
		Nilai SKM	Sangat Baik
		Persentase realisasi penyerapan anggaran	85%

## 2.4 Perencanaan Anggaran Tahun 2022

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 614.073.998.694 Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan dan *refocusing*. Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 551.813.751.272 dengan rincian sebagai mana tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2**  
**Rincian Anggaran pada Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Anggaran Perubahan</b>
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.050.000	9.050.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.662.229.270	14.900.763.141
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	400.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.583.395.929	2.675.040.563
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	159.944.377	184.558.387
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.319.517.750	3.383.957.750
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.964.000.000	3.118.500.000
2.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.078.748.878	571.494.058
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.199.764.600	19.669.075.552
3.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	61.564.746.620	60.704.873.897
4.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	497.432.601.270	446.196.437.924

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Terhadap terjadinya celah kinerja, dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

#### 3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.1  
Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja**

No.	Nilai	Predikat Kinerja
1	$> 90,01$	Sangat Baik
2	$80,01 \leq 90$	Baik
3	$70,01 \leq 80$	Cukup
4	$0 \leq 70,01$	Kurang

Hasil pengukuran kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1  
Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja**

No.	Tujuan	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Secara Memadai	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	100,05%	Sangat Baik
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	103,76%	Sangat Baik

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2022. Berikut analisis capaian kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022:

#### 1. Sasaran pertama “Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap”

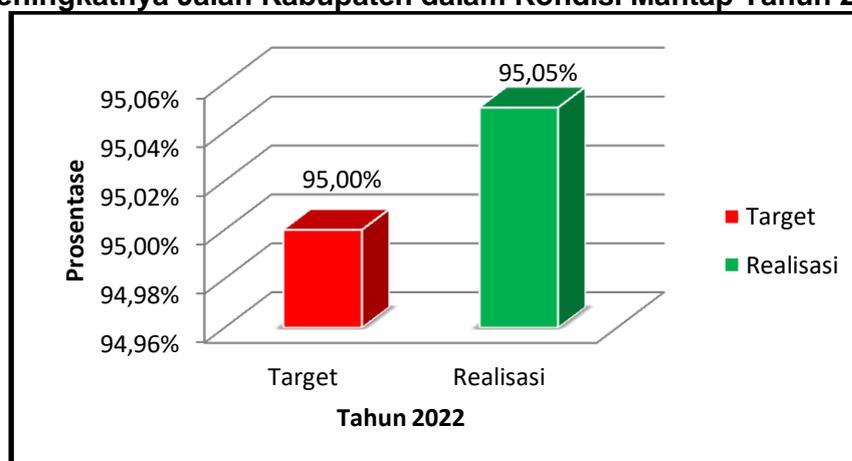
Dalam sasaran pertama untuk tahun 2022 nilai capaian kinerjanya sebesar 100,05%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran pertama Meningkatkan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Kinerja Sasaran pertama**  
**Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	95,00%	95,05%	100.05%

Untuk mengukur jalan mantap. Berdasarkan tabel 3.2 diatas, indikator tunggalnya dapat direalisasi sebesar 95,05% dengan capaian 100,05% dari target. Adapun grafiknya akan disajikan sebagai berikut:

**Grafik 3.1**  
**Realisasi kinerja sasaran pertama**  
**Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Tahun 2022**



Dalam pencapaian sasaran pertama diukur tingkat keberhasilannya dengan indikator “Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap”. Untuk mengukur prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap dilakukan dengan cara :

$$\{ (\text{Panjang jalan kondisi baik + sedang}) / \text{Panjang jalan kabupaten} \} \times 100\%$$

Kondisi jalan menurut Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, terkait standar perencanaan geometrik untuk jalan, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Jalan dengan kondisi baik adalah jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan.
- b. Jalan dengan kondisi sedang adalah jalan dengan kerataan permukaan perkerasan sedang, mulai ada gelombang tetapi tidak ada kerusakan permukaan.
- c. Jalan dengan kondisi rusak ringan adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan kurang dari 20 dari luas jalan yang ditinjau.
- d. Jalan dengan kondisi rusak berat adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak buaya, dan terkelupas yang cukup besar 20-60 dari ruas jalan yang ditinjau disertai dengan kerusakan lapis pondasi seperti amblas, sungkur, dan sebagainya.

Jalan Mantap Konstruksi adalah jalan dengan kondisi konstruksi yang untuk penanganannya membutuhkan kegiatan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin, sedangkan Jalan Tak Mantap adalah jalan dengan kondisi di luar koridor mantap yang mana untuk penanganannya melalui rehabilitasi jalan atau rekonstruksi jalan dengan tujuan untuk menambah nilai struktur konstruksi jalan. Konsep tingkat kemantapan jalan yang digunakan oleh Ditjen Bina Marga antara lain berdasarkan parameter kerataan jalan atau International Roughness Index IRI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 13/PRT/M/2011 Kategori jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.

Untuk mencapai target kinerja pada Tahun 2022 yakni jalan dan jembatan Kabupaten terjaga dalam kondisi mantap, antara lain :

1. Dilaksanakan Pembangunan Jalan pada beberapa ruas
2. Dilaksanakan rekonstruksi jalan dengan menggunakan konstruksi beton maupun aspal pada beberapa ruas yang perlu segera dilaksanakan peningkatan
3. Dilaksanakan pemeliharaan rutin jalan secara berkala

## 2. Sasaran kedua “Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Sumber Daya Air”

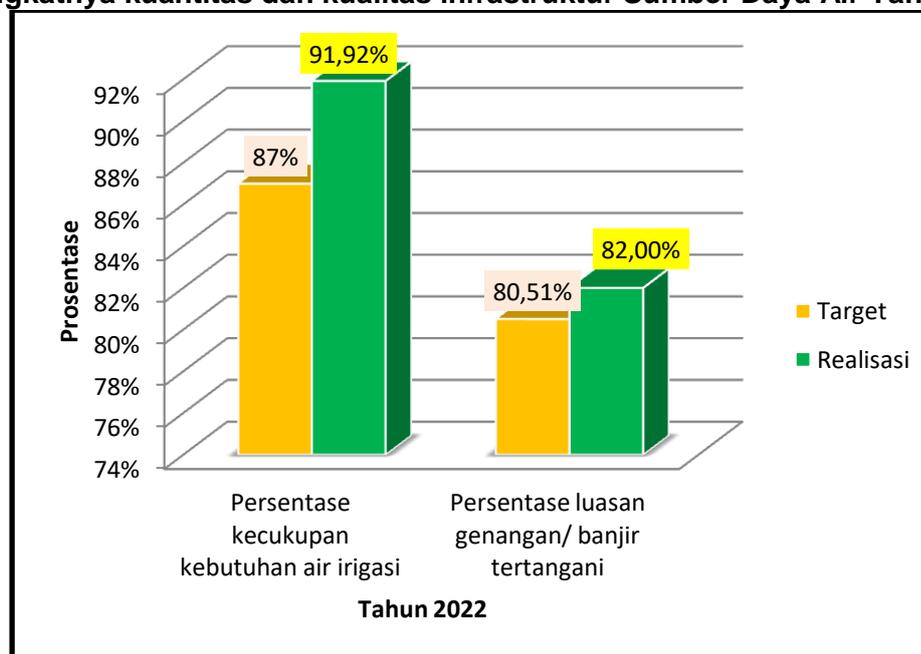
Dalam sasaran kedua untuk tahun 2022 rata-rata nilai capaian kinerjanya sebesar 103,76%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran kedua, sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Kinerja Sasaran kedua**  
**Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi	87%	91,92%	105,66%
		Persentase luasan genangan/ banjir tertangani	80,51%	82,00%	101,85%

Untuk mengukur sasaran kedua. Berdasarkan tabel 3.3 diatas, indikator tunggalnya dapat direalisasi sebesar 95,05% dengan capaian 100,05% dari target. Adapun grafiknya akan disajikan sebagai berikut:

**Grafik 3.2**  
**Realisasi kinerja Sasaran kedua**  
**Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2022**



### Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi

Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan

kontribusi air tanah. Sampai dengan tahun 2022 baku sawah yang tercukupi kebutuhan air irigasi yaitu 3.583 hektar dari kebutuhan yang seharusnya 3.898 hektar sehingga capaian persentase kecukupan kebutuhan air irigasi tahun 2022 adalah 106% dari target 87% atau tercapai 91,92%.

Adapun cara mengukur persentase kecukupan kebutuhan air irigasi dengan adalah sebagai berikut :

$$\text{(Luas sawah yang dapat diairi / Luas sawah yang ada) x 100 \%}$$

Kecukupan kebutuhan air irigasi diukur berdasarkan ketersediaan air irigasi di intake Dam Lengkong (jumlah air yang dapat dipenuhi untuk kebutuhan irigasi) yang alokasinya ditetapkan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi (DI) sesuai Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air adalah :

- D.I. Lintas Provinsi diatas 3000 Ha adalah Pemerintah.
- D.I. Lintas Kab. diatas 1000 – 3000 Ha adalah Pemerintah Provinsi.
- D.I. berada dalam satu Kab/Kota (DI kecil) dibawah 1000 Ha adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun upaya yang telah dilakukan agar kebutuhan air irigasi dapat tercukupi optimal, antara lain :

1. Pemberian air yang dilakukan secara terus menerus maupun dengan pola giliran sesuai ketersediaan debit yang ada.
2. Pemenuhan air irigasi dari dam/ bendung suplisi yang berada di afvoer maupun bantuan pompa air, sehingga kebutuhan air dapat dicukupi
3. Pengaturan operasional DAM penerus sesuai dengan kebutuhan pola tata tanam

#### **Persentase luasan genangan/ banjir tertangani**

Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah delta memiliki resiko yang tinggi terkena genangan / banjir. Persentase luasan genangan / banjir tertangani pada tahun 2022 adalah 82,00% dari target 80,51% atau tercapai 101,85%. Perhitungan persentase luas genangan yang tertangani, adalah sebagai berikut:

$$\text{(Luas area genangan / Luas area rawan genangan) x 100 \%}$$

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk menangani genangan / banjir, antara lain :

1. Pembangunan Rumah Pompa Jalan Raya Jati (Depan Lippo Plaza) Kec. Sidoarjo.
2. Pembangunan Rumah Pompa dan Instalasi Pompa Saluran Gedangrowo Ds. Banjarpanji Kec. Tanggulangin Pembangunan Rumah Pompa Saluran Gedangrowo.
3. Pembangunan Rumah Pompa dan Instalasi Pompa di DAM Afv. Kedungpeluk Ds. Kedungbanteng Kec. Tanggulangin.
4. Rehab Bangunan Rumah Panel Dam Pendopo Kec. Buduran.

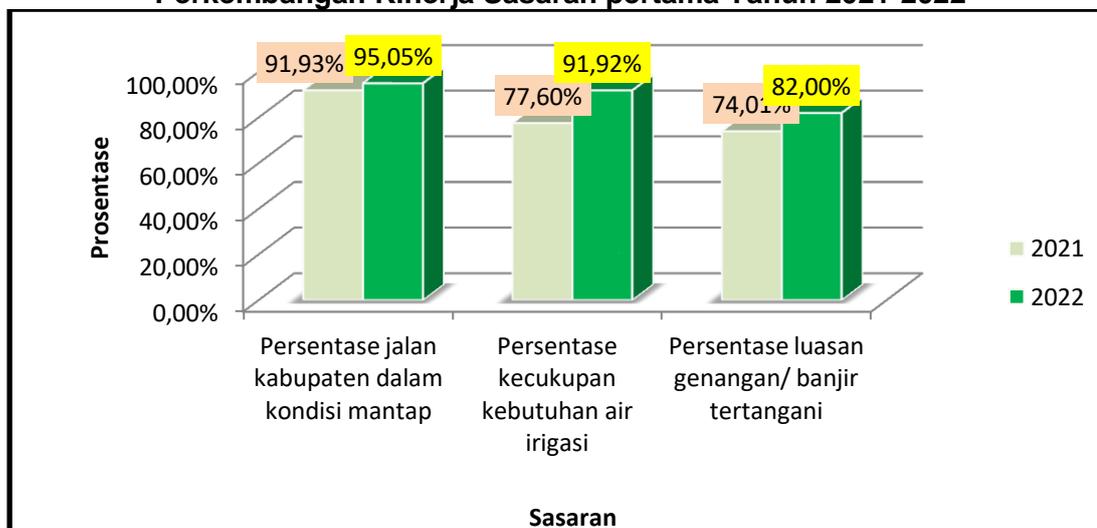
Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal.

Untuk saat ini masih belum bisa membandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Nasional pada sasaran yang indikatornya “jalan mantap” Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 95,05%, dikarenakan untuk Nasional maupun Provinsi Jawa Timur data belum dirilis.

**Tabel 3.4**  
**Perkembangan Kinerja Sasaran Tahun 2021-2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	91,93%	95,05%
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi	77,60%	91,92%
3		Persentase luasan genangan/ banjir tertangani	74,01%	82,00%

**Grafik 3.3**  
**Perkembangan Kinerja Sasaran pertama Tahun 2021-2022**

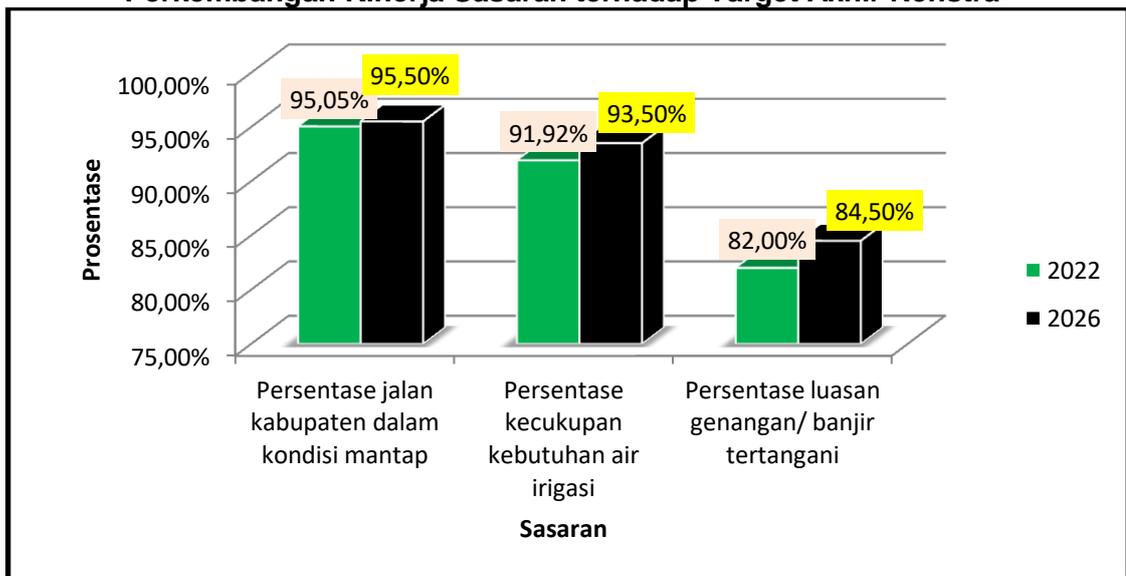


Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian pada tahun 2022 ini telah/tidak mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 terhadap target target akhir Renstra:

**Tabel 3.5**  
**Perkembangan Kinerja Sasaran terhadap Target Akhir Renstra**

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	Persentase Kemajuan
1	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	95,50%	95,05%	99,53%
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi	93,5%	91,92%	98,31%
		Persentase luasan genangan/ banjir tertangani	84,5%	82,00%	97,04%

**Grafik 3.4**  
**Perkembangan Kinerja Sasaran terhadap Target Akhir Renstra**



Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program yang digunakan untuk mewujudkan kedua sasaran diatas adalah sebesar Rp.527.141.881.431 dengan realisasi sebesar Rp.450.502.696.948. Output dari pelaksanaan program tersebut dapat mengungkap realisasi kedua sasaran.

Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian kedua sasaran:

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Kinerja Program**

No.	Program	Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Saprass Pengelolaan SDA yang dikelola dan dipelihara	100%	100%	20.240.569.610	17.258.500.622
		Persentase Saluran Irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara	88%	88%		
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	26%	26%	60.704.873.897	50.911.873.210
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	90,5%	95,05%	446.196.437.924	382.332.323.116
<b>Total</b>					<b>527.141.881.431</b>	<b>450.502.696.948</b>

### 3.3 Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2022 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Kinerja dan Keuangan**

No.	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Saprass Pengelolaan SDA yang dikelola dan dipelihara	100%	100%	100	20.240.569.610	17.258.500.622	85,27
		Persentase Saluran Irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara	88%	88%	100			
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	26%	26%	100	60.704.873.897	50.911.873.210	83,87
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	90,5%	95,05%	100,05	446.196.437.924	382.332.323.116	85,69

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 *Kesimpulan*

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2022 yaitu **Sangat Berhasil** sebagaimana berikut ini:

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	% Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	100,05%	Sangat Berhasil
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi	105,66%	Sangat Berhasil
		Persentase luasan genangan/ banjir tertangani	101,85%	Sangat Berhasil

### 4.2 *Pemecahan Masalah*

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain:

1. Dilaksanakan Pembangunan Jalan pada beberapa ruas
2. Dilaksanakan rekonstruksi jalan dengan menggunakan konstruksi beton maupun aspal pada beberapa ruas yang perlu segera dilaksanakan peningkatan
3. Dilaksanakan pemeliharaan rutin jalan secara berkala
4. Pemberian air yang dilakukan secara terus menerus maupun dengan pola giliran sesuai ketersediaan debit yang ada.
5. Pemenuhan air irigasi dari dam/ bendung suplesi yang berada di afvoer maupun bantuan pompa air, sehingga kebutuhan air dapat dicukupi.
6. Pengaturan operasional DAM penerus sesuai dengan kebutuhan pola tata tanam.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### **A. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah  
<https://drive.google.com/file/d/11JrRIQEj9ceGwwb-zEpXdPGLpwLr4Lyd/view?usp=sharing>
2. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Perubahan  
[https://drive.google.com/file/d/1IXKZktBiglrlHvOXGO5QYbG-cCGu\\_nBc/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1IXKZktBiglrlHvOXGO5QYbG-cCGu_nBc/view?usp=sharing)

### **B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

[https://drive.google.com/file/d/1DsVhjPZ34pV7y4RNpvBDOBnC\\_6hGA07f/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1DsVhjPZ34pV7y4RNpvBDOBnC_6hGA07f/view?usp=sharing)

### **C. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2022**

<https://drive.google.com/file/d/1hZx-IPVz4hdWe7tRp9jPu9q2M63KOMI/view?usp=sharing>

### **D. Pohon Kinerja yang menunjang sasaran kinerja 2022**

<https://drive.google.com/file/d/1Z8jIFhp8mp418ZgbX8VR52GenBq8WtOf/view?usp=sharing>

### **E. Capaian Prestasi / Penghargaan Perangkat Daerah Tahun 2022**